

ABSTRAK

Tahun 2019 muncul sebuah virus yang diberi nama COVID-19 oleh WHO. Virus tersebut pada awalnya muncul dari negara China dan akhirnya menyebar dan meluas ke berbagai penjuru dunia, sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai pandemi. Merebaknya virus tersebut ke berbagai penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia membuat kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Kecemasan dan kekhawatiran tersebut berbuntut pada sebuah tindak pidana penolakan jenazah yang terjadi di Ungaran. Tindak pidana penolakan Jenazah COVID-19 dadili di Pengadilan Negeri Ungaran dan merupakan yang pertama kali dilakukan penegakkan hukumnya hingga akhirnya diikuti oleh wilayah lain. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar putusan penjatuh pidana perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode yuridis-sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat secara kualitatif, dengan mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun, dengan cara observasi data lapangan sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan persidangan perkara penolakan jenazah COVID-19 di Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dibagi atas dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan keterangan ahli, barang bukti, unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi, dan tuntutan Penuntut Umum. Pertimbangan non-yuridis antara lain keadaan sikap batin pelaku dan keluarga korban serta akibat perbuatan terdakwa. Kendala yang dihadapi dalam menjatuhkan putusan pembedaan perkara penolakan jenazah COVID-19 yaitu karena perkara penolakan jenazah COVID-19 ini merupakan yang pertama dilakukan penegakkan hukumnya di Indonesia dan persidangan dilakukan dimasa pandemi.

Kata Kunci: COVID-19, Tindak Pidana Penolakan Jenazah, Tinjauan Yuridis